SENARAI KEARIFAN LOKAL AKUNTANSI:
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Vol. 02, No. 01, Mei 2026, pp. 38-53
e-ISSN: 3110-0023

Pendampingan Pengelolaan Administrasi Perpajakan melalui Sistem Administrasi Perpajakan Digital pada BPKPD Kabupaten Pamekasan

Intan Nur Aini[1], Khy'sh Nusri Leapatra Chamalinda[2]
[1,2] Universitas Trunodjoyo Madura

*Korespondensi
E-mail: *intanna.207@gmail.com*

Dikirim: 13 Mei 2026	Direvisi: 21 Mei 2026	Diterima: 31 Mei 2026

Abstrak

Pengelolaan administrasi perpajakan di BPKPD Kabupaten Pamekasan masih menghadapi beberapa kendala, seperti ketidaksesuaian data dan proses administrasi yang dilakukan secara terpisah. Selain itu, pengecekan data masih dilakukan secara berulang sehingga mempengaruhi efisiensi kerja administrasi perpajakan. Pemanfaatan sistem Coretax dalam administrasi perpajakan juga belum berjalan secara optimal sehingga diperlukan pendampingan dalam penggunaannya. Tujuan kegiatan ini adalah mendukung pengelolaan administrasi perpajakan melalui pendampingan administrasi perpajakan digital berbasis Coretax. Metode yang digunakan adalah pendekatan *service learning* melalui program magang MBKM. Kegiatan dilaksanakan melalui tahapan persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pengecekan data menjadi lebih sistematis. Proses pembuatan billing dan penyusunan bukti potong menjadi lebih terstruktur. Penggunaan sistem Coretax membantu mengurangi kesalahan penginputan data. Selain itu, administrasi perpajakan menjadi lebih terintegrasi dan terdokumentasi secara digital. Kegiatan ini memberikan dampak terhadap peningkatan efisiensi dan keteraturan administrasi perpajakan di instansi.
Kata Kunci: Administrasi perpajakan, Pendampingan, Sistem perpajakan digital, Coretax, Instansi pemerintah daerah

Abstract

Tax administration at BPKPD Pamekasan Regency still faces data discrepancies and inefficient administrative processes. Repeated data verification also affects work efficiency. In addition, the use of the Coretax system has not been fully optimized, so assistance is still needed in its implementation. This community service activity aimed to support tax administration through assistance in digital tax administration based on the Coretax system. The method used was a service learning approach through the MBKM internship program. The activity was carried out through preparation, implementation, monitoring and evaluation, and reporting stages. The results showed that data verification became more systematic. Billing code creation and withholding tax slip preparation became more structured. The use of the Coretax system reduced data input errors. In addition, tax administration became more integrated and digitally documented. This activity improved the efficiency and organization of tax administration within the institution.
***Keywords**: Tax administration, Assistance, Digital tax system, Coretax, Local government institution*

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

SENARAI KEARIFAN LOKAL AKUNTANSI:
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Vol. 02, No. 01, Mei 2026, pp. 38-53
e-ISSN: 3110-0023

PENDAHULUAN

Pengelolaan administrasi perpajakan saat ini mengalami pergeseran dari sistem semi konvensional yang tergolong manual menuju sistem berbasis digital sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pengelolaan data perpajakan (Dewi *et al.*, 2025). Salah satu bentuk implementasinya ditunjukkan melalui penggunaan *Coretax Administration System* yang dirancang untuk mengintegrasikan berbagai layanan perpajakan dalam satu sistem berbasis data (Isnan & Sofa, 2026). Penerapan sistem administrasi perpajakan berbasis digital tidak hanya diartikan sebagai modernisasi teknis, tetapi juga sebagai strategi dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak (Qosim & Winarsih, 2025). Implementasi Coretax Administration System merupakan bagian dari upaya reformasi administrasi perpajakan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui penerapan sistem perpajakan berbasis digital. Namun, dalam masa transisi dari sistem administrasi perpajakan sebelumnya ke Coretax masih terdapat berbagai kendala, seperti gangguan akses layanan, penyesuaian alur administrasi, migrasi data, serta adaptasi pengguna terhadap sistem baru (David & Tjaraka, 2026). DJP juga menyampaikan bahwa pada tahap awal implementasi Coretax masih diperlukan optimalisasi dan penyempurnaan sistem guna mendukung kelancaran layanan administrasi perpajakan digital (Direktorat Jenderal Pajak, 2025). Selain itu, DJP menetapkan kebijakan relaksasi administrasi perpajakan selama masa transisi implementasi Coretax untuk menjaga kelancaran layanan perpajakan serta mendukung kepatuhan wajib pajak (Direktorat Jenderal Pajak, 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan sistem perpajakan digital tidak hanya memerlukan kesiapan teknologi, tetapi juga kesiapan pengguna dalam memahami dan mengoperasikan sistem secara tepat (Baihaqi & Kristina, 2026).

Kondisi tersebut juga ditemukan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pamekasan sebagai instansi yang memiliki peran penting dalam pengelolaan administrasi keuangan dan perpajakan daerah. BPKPD Kabupaten Pamekasan menjadi lokasi yang krusial dalam kegiatan pengabdian ini karena instansi tersebut menangani berbagai aktivitas administrasi perpajakan, seperti pembuatan kode billing, penginputan data perpajakan, serta penyusunan bukti potong yang dilakukan secara rutin dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah. Dalam pelaksanaannya, instansi ini telah mulai menerapkan sistem administrasi perpajakan berbasis digital melalui Coretax untuk mendukung efektivitas proses kerja. Namun, berdasarkan hasil observasi selama kegiatan magang, masih ditemukan beberapa kendala seperti kesalahan dalam penginputan data, pemanfaatan fitur sistem yang belum optimal, serta masih adanya penggunaan metode manual dalam beberapa proses administrasi perpajakan. Selain itu, keterbatasan pemahaman teknis pengguna terhadap sistem digital menyebabkan proses administrasi masih memerlukan pengecekan berulang sehingga berdampak pada efisiensi kerja (Laili et al., 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendampingan dalam penggunaan sistem perpajakan digital masih diperlukan guna mendukung pengelolaan administrasi perpajakan yang lebih efektif, tertib, dan akurat (Hamim et al., 2026).

Permasalahan yang terjadi sejalan dengan beberapa pengabian sebelumnya yang menunjukkan bahwa dalam penerapan administrasi perpajakan digital masih mengalami

kendala, terutama dalam tahap awal implementasi, seperti rendahnya literasi digital, dan ketidasesuaian data pelaporan (Hertina *et al*., 2025). Penelitian lain juga mengungkapkan bahwabahwa kegiatan pendampingan dalam penerapan sistem digital dapat meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pengguna dalam pelaporan pajak (Suliah & Utomo, 2023). Kegiatan pendampingan dalam administrasi perpajakan dinilai efektif dalam membantu proses administrasi perpajakan secara langsung. Namun demikian, sebagian besar kajian yang dilakukan masih berfokus pada wajib pajak atau pihak eksternal, sehingga belum banyak kajian yang mengangkat pengelolaan administrasi internal instansi pemerintah daerah (Rochim & Amiranto, 2026).

Secara ideal, pengelolaan administrasi perpajakan diharapkan dapat berjalan secara terarah, akurat, dan efisien melalui pemanfaatan sistem digital yang mendukung proses pengolahan data secara menyeluruh (Dewi et al., 2025). Namun, dalam implementasinya masih terdapat kesenjangan antara kondisi yang diharapkan dengan kenyataan di lapangan, terutama dalam hal optimalisasi penggunaan sistem oleh pengguna. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi saja, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia dalam mengoperasikannya (Dwiki.S *et al*., 2026). Selain itu, pada tahap awal implementasi sistem digital seperti Coretax masih ditemukan berbagai kendala teknis yang mempengaruhi efektivitas administrasi perpajakan (Dewi et al., 2025). Oleh karena itu, diperlukan upaya yang tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga melalui pendekatan praktis yang mampu menjawab permasalahan secara langsung di lingkungan kerja.

Urgensi dari kegiatan pengabdian ini terletak pada pentingnya peningkatan kualitas pengelolaan administrasi perpajakan dalam mendukung kinerja instansi serta akuntabilitas keuangan daerah (Wijaya *et al*., 2025). Pemanfaatan sistem digital yang optimal tidak hanya berdampak pada efisiensi kerja, tetapi juga pada kualitas data dan ketepatan pelaporan. Tanpa adanya pendampingan, implementasi sistem digital berpotensi tidak berjalan secara maksimal dan tidak memberikan dampak signifikan terhadap kinerja administrasi (Lestari & Fadrianti, 2026). Kebaruan dalam kegiatan pengabdian ini terletak pada pendekatan pendampingan yang dilakukan secara langsung pada aktivitas administrasi perpajakan internal instansi pemerintah daerah melalui penggunaan sistem Coretax. Berbeda dengan pengabdian sebelumnya yang lebih banyak berfokus pada sosialisasi perpajakan kepada wajib pajak atau pelatihan secara umum (Suliah & Utomo, 2023), kegiatan ini menitikberatkan pada asistensi teknis dalam proses administrasi perpajakan sehari-hari, seperti pembuatan kode billing, penginputan data perpajakan, dan penyusunan bukti potong. Dengan demikian, setiap kendala yang muncul dapat segera dikenali dan ditangani secara langsung. Pendekatan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan pemahaman, tetapi juga kemampuan teknis dalam mengelola administrasi perpajakan berbasis digital.

Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan pegawai dalam mengelola administrasi perpajakan berbasis digital, sekaligus mendorong pemanfaatan sistem secara lebih optimal di BPKPD Kabupaten Pamekasan. Selain itu, kegiatan ini diharapkan mampu mengurangi kesalahan administrasi serta meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan data perpajakan (Aulia *et al*., 2025).

SENARAI KEARIFAN LOKAL AKUNTANSI:
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Vol. 02, No. 01, Mei 2026, pp. 38-53
e-ISSN: 3110-0023

Pelaksanaan pengabdian ini tidak hanya berfokus pada penggunaan sistem, tetapi juga pada penguatan pemahaman terkait prosedur administrasi perpajakan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui keterlibatan langsung dalam aktivitas kerja sehari-hari, pendampingan ini diharapkan dapat membantu pegawai dalam mengenali berbagai kendala yang dihadapi serta menemukan solusi yang tepat (Arifianti *et al*., 2025). Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya memberikan dampak jangka pendek berupa peningkatan kinerja administrasi, tetapi juga berpotensi mendukung keberlanjutan pengelolaan administrasi perpajakan yang lebih tertib, efektif, dan akuntabel di lingkungan BPKPD Pamekasan.

METODE

Terlaksananya kegiatan pengabdian diselenggarakan melalui kegiatan magang industri Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang berlangsung selama lebih dari lima bulan, dimulai dari bulan Januari hingga bulan Juni tahun 2026. Program magang ini merupakan kegiatan pengabdian masyarakat yang ditempatkan di beberapa instansi yang relevan dengan bidang akuntansi. Selama kegiatan magang berlangsung mahasiswa memiliki kesempatan untuk terlibat langsung mengenai setiap proses administrasi terutama mengenai sistem administrasi perpajakan di lingkungn kerja pemerintah, khususnya di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pamekasan.

Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian diperlukan pendekatan yang mampu menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan mitra di lapangan. Pada kegiatan pengabdian ini, pendekatan yang digunakan adalah *service learning*, yaitu metode pembelajaran yang mengintegrasikan teori dengan pengalaman langsung melalui keterlibatan mahasiswa dalam dunia kerja (Azizah *et al*., 2025). Dalam konteks ini, kegiatan magang menjadi bentuk implementasi *Service Learning* karena memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berpartisipasi secara aktif dalam lingkungan kerja nyata sekaligus berkontribusi dalam pelayanan atau kegiatan institusi sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat. Melalui pendekatan ini, mahasiswa tidak hanya memahami alur administrasi secara teoritis, tetapi juga terlibat secara langsung dalam membantu proses pengelolaan administrasi perpajakan. Subjek pengabdian dalam kegiatan ini adalah pegawai atau staf yang terlibat dalam pengelolaan administrasi perpajakan di BPKPD Kabupaten Pamekasan.

Pelaksanaana kegiatan pengabdian masyarakat yang diterapkan melalui program magang MBKM dilakukan dalam beberapa tahapan yang membentuk satu kesatuan proses, yakni terdiri dari tahap persiapan, pelaksanaan magang, serta tahapan monitoring dan evaluasi, serta tahap pelaporan kegiatan magang. Tahapan ini dirancang agar pelaksanaan kegiatan berjalan dengan sistematis dan tetap berfokus pada hasil yang ingin dicapai. Pada tahap persiapan, dilakukan pengenalan awal terhadap lingkungan kerja instansi BPKPD serta observasi mengenai alur administrasi perpajakan yang berlaku di BPKPD Kabupaten Pamekasan. Tahapan ini merupakan proses yang bertujuan untuk memahami proses kerja yang berjalan baik yaitu dimulai dari verifikasi data, pembuatan billing pajak, pembuatan e-bupot, dan penggunaan sistem administrasi perpajakan digital seperti Coretax. Pada tahap ini juga dilakukan penyesuaian prosedur kerja serta pemahaman terhadap standar operasional di lingkungan instansi.

Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan magang, di mana mahasiswa mulai terlibat

SENARAI KEARIFAN LOKAL AKUNTANSI:
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Vol. 02, No. 01, Mei 2026, pp. 38-53
e-ISSN: 3110-0023

langsung dalam kegiatan administrasi perpajakan di instansi. Keterlibatan ini meliputi membantu pengecekan kesesuaian data, melakukan verifikasi dokumen perpajakan, serta mendukung proses penginputan data dalam sistem perpajakan digital. Kegiatan dilakukan secara langsung dengan mengikuti alur kerja yang berlaku, sehingga mahasiswa dapat memahami proses administrasi sekaligus membantu kelancaran pekerjaan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini didukung oleh penggunaan dokumen administrasi perpajakan, sistem Coretax, serta standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.

Tahap monitoring dan evaluasi dilakukan selama kegiatan berlangsung melalui pengamatan terhadap proses kerja serta komunikasi dengan pegawai atau staf yang terlibat dalam pengelolaan administrasi perpajakan. Evaluasi kegiatan ini dilakukan menggunakan pendekatan comparative analysis sederhana melalui perbandingan kondisi sebelum dan sesudah pelaksanaan pendampingan. Evaluasi dilakukan dengan memperhatikan perubahan dalam proses administrasi perpajakan, ketelitian penginputan data, kelengkapan dokumen administrasi, serta penggunaan sistem Coretax selama kegiatan berlangsung. Instrumen evaluasi yang digunakan dalam kegiatan pengabdian meliputi lembar observasi, dokumentasi administrasi perpajakan, catatan monitoring kegiatan, hasil verifikasi data, serta hasil komunikasi dan diskusi dengan pegawai yang terlibat dalam pengelolaan administrasi perpajakan di BPKPD Kabupaten Pamekasan. Adapun indikator keberhasilan kegiatan pengabdian disajikan pada tabel 1 berikut:

Tabel. 1 Indikator Keberhasilan Kegiatan Pengabdian

No	Indikator Keberhasilan	Bentuk Evaluasi
1.	Penurunan tingkat kesalahan penginputan data perpajakan	Perbandingan hasil verifikasi data sebelum dan sesudah pendampingan
2.	Peningkatan ketelitian dalam proses verifikasi dokumen	Observasi proses pengecekan dan verifikasi dokumen
3.	Kelengkapan dokumentasi bukti potong dan billing pajak	Pemeriksaan kelengkapan dokumen administrasi perpajakan
4.	Kelancaran penggunaan sistem Coretax dalam administrasi perpajakan	Pengamatan penggunaan sistem selama kegiatan berlangsung
5.	Efisiensi proses administrasi perpajakan	Perbandingan proses kerja sebelum dan sesudah pendampingan

Sumber: Data diolah, (2026)

Tahap terakhir adalah pelaporan kegiatan magang, yakni mencakup penyusunan laporan kegiatan secara keseluruhan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengabdian masyarakat yang diterapkan melalui magang MBKM. Laporan ini memuat rangkaian kegiatan yang telah dilakukan, mulai dari pembuatan latar belakang, laporan kegiatan harian selama magang, ketercapaian kegiatan magang, serta gambaran terhadap pelaksanaan kegiatan. Selain itu, hasil kegiatan ini juga dijadikan sebagai bahan dalam

SENARAI KEARIFAN LOKAL AKUNTANSI:
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Vol. 02, No. 01, Mei 2026, pp. 38-53
e-ISSN: 3110-0023

penyusunan artikel pengabdian sebagai bentuk luaran dari program magang MBKM. Gambar 1 berikut merupakan strategi riset pengabdian yang menggambarkan tahapan pelaksanaan kegiatan melalui program magang.



Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

HASIL DAN DAMPAK

Pelaksanaan kegiatan pengabdian dalam pengelolaan administrasi perpajakan berbasis digital menunjukkan adanya penerapan sistem kerja yang lebih terstruktur dalam mendukung proses administrasi di instansi pemerintah daerah. Kegiatan yang dilakukan meliputi pengecekan kesesuaian data, pembuatan kode billing pajak, penginputan data perpajakan, serta penyusunan bukti potong melalui sistem Coretax. Proses tersebut dilakukan secara bertahap untuk memastikan kesesuaian data sebelum diproses lebih lanjut dalam sistem administrasi perpajakan digital. Melalui kegiatan ini, pengelolaan administrasi perpajakan menjadi lebih tertata dan mendukung kelancaran proses kerja di lingkungan BPKPD Kabupaten Pamekasan. Berikut merupakan uraian hasil dan pembahasan dari kegiatan yang telah dilaksanakan.

Proses Pengecekan Data dan Kelengkapan Administrasi Perpajakan

Proses administrasi perpajakan diawali dengan kegiatan pengecekan data dan kelengkapan administrasi sebelum dilakukan proses selanjutnya. Pada tahap ini, dilakukan proses pengecekan dokumen untuk memastikan kesesuaian data yang diterima, seperti nilai transaksi, identitas pihak terkait baik itu dari NIK mapun NPWP, serta jenis pajak yang dikenakan agar sesuai dengan kebutuhan administrasi perpajakan. Data yang digunakan umumnya diperoleh dari bendahara pengeluaran, sehingga perlu dilaukan proses pencocokan kembali informasi yang ada dengan dokumen pendukung yang tersedia. Proses ini dilakukan secara bertahap untuk memastikan bahwa data yang akan digunakan sudah sesuai dan dapat diproses ke tahap berikutnya.

Dalam pelaksanaannya, masih ditemukan beberapa kondisi di mana data yang diterima belum lengkap atau terdapat perbedaan informasi maupun kesalahan input data, sehingga memerlukan pengecekan ulang sebelum diproses lebih lanjut. Oleh karena itu, proses verifikasi data merupakan bagian yang sangat penting dalam mendukung ketelitian dan kelancaran proses administrasi perpajakan. Keterlibatan dalam tahap ini membantu mempercepat proses pemeriksaan data serta meminimalisir terjadinya kesalahan administrasi, serta memastikan informasi yang didapatkan telah sesuai sebelum dilakukan proses pembuatan kode billing maupun penyusunan bukti potong. Selain itu, kegiatan ini manunjukkan bahwa pentingnya kesesuaian datamenjadi dasar penting dalam proses pengelolaan administrasi perpajakan, karena jika terjadi kesalahan ditahap awal dapat mempengaruhi proses selanjutnya.

Pembuatan Kode Billing Pajak melalui Sistem Coretax

Proses pembuatan kode billing pajak dilakukan setelah data yang digunakan telah melalui tahap pengecekan sebelumnya. Pada tahap ini, dilakukan pembuatan e-billing untuk beberapa jenis pajak, seperti PPh Pasal 21, PPh Pasal 4 ayat 2, dan PPN Dalam Negeri melalui sistem Coretax pada menu pembayaran dan layanan mandiri kode billing. Proses ini dilakukan dengan menginput data yang diperlukan, seperti jenis pajak, masa pajak, deskripsi mengenai serta nominal yang akan dibayarkan sesuai dengan data yang telah disiapkan dan telah melalui proses pengecekan.

Dalam pelaksanaannya, proses pembuatan billing dilakukan dengan memanfaatkan fitur *impersonate* untuk mengakses akun yang digunakan dalam pengelolaan perpajakan. Setelah semua data telah diinput, sistem akan menghasilkan kode billing yang kemudian digunakan sebagai dasar dalam proses pembayaran pajak. Penggunaan sistem Coretax membantu proses pembuatan billing menjadi lebih mudah dan terstruktur karena data dapat diproses dalam satu sistem digital. Selain itu, sistem juga membantu mempermudah pengecekan kembali data yang telah diinput sehingga dapat mengurangi potensi kesalahan administrasi dalam proses pembuatan billing pajak.

Pemanfaatan sistem digital dalam proses pembuatan kode billing ini membuat proses administrasi menjadi lebih mudah dibandingkan dengan pembuatan billing secara konvensional. Serta data yang telah disimpan dalam sistem dapat diakses kembali sebelum masa aktif kode billing tersebut habis yakni selama 14 hari sejak kode billing tersebut diterbitkan. Oleh karena itu, hal tersebut sangat membantu mempercepat dan mempermudah proses administrasi perpajakan dan mendukung pengelolaan data di instansi menjadi lebih teratur.

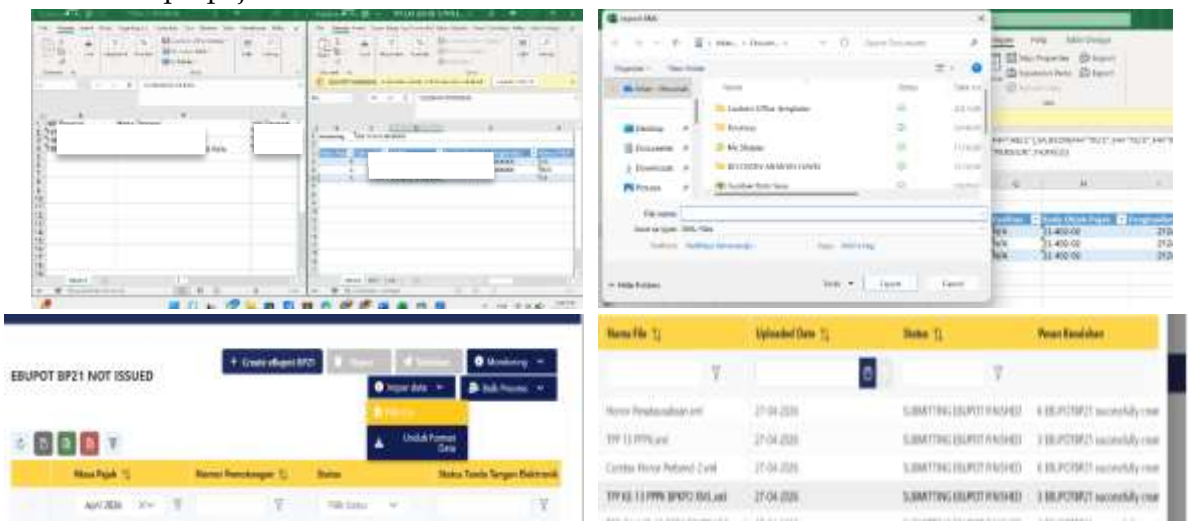
Penginputan Data dan Penyusunan Bukti Potong

Proses penginputan data dilakukan untuk penyusunan bukti potong (e-bupot) dengan menggunakan data yang telah melalui tahap pengecekan sebelumnya. Data dipedroleh dari bendahara pengeluaran kemudian diinput kedalam template XML Coretax berupa excel yang tersedia pada website pajak.go.id/coretax yang didalamnya berisi beragam informasi untuk memahami terkait dengan penerapan coretax, template XML tersebut kemudian dapat dengan mudah untuk didownload sesuai dengan kebutuhan yang

SENARAI KEARIFAN LOKAL AKUNTANSI:
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Vol. 02, No. 01, Mei 2026, pp. 38-53
e-ISSN: 3110-0023

akan digunakan. Proses ini dilakukan dengan mengikuti format yang telah ditentukan agar file dapat digunakan dalam sistem Coretax, khususnya pada menu e-bupot. Kegiatan ini membutuhkan ketelitian karena setiap data yang dimasukkan harus sesuai agar tidak terjadi kesalahan pada saat proses selanjutnya. Apabila seluruh data telah selesai diinput, file kemudian diekspor menggunakan fitur *developer* pada Microsoft Excel menjadi format file XML agar dapat diunggah dan diproses lebih lanjut dalam sistem Coretax.

Setelah proses ekspor selesai, format file XML diunggah ke dalam sistem Coretax dan dilakukan pengecekan kembali terhadap kesesuaian data, baik dari segi nominal maupun informasi lainnya. Pengecekan ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang telah diinput sudah sesuai. Apabila seluruh data telah benar, proses dilanjutkan untuk menerbitkan bukti potong melalui sistem e-bupot, yang kemudian menjadi dasar dalam proses pembayaran pajak. Penggunaan template XML dalam sistem Coretax membantu proses penyusunan bukti potong menjadi lebih sistematis dan terstruktur dibandingkan dengan penyusunan bukti potong sebelumnya. Format data yang telah disesuaikan membantu mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan input maupun ketidaksesuaian data pada saat proses unggah dokumen ke dalam sistem. Selain itu apabila terdapat kesalahan dalam pengimputan data, sistem Coreatax akan mendeteksi ketidaksesuaian tersebut sehingga proses impor data tidak dapat dilakukan dan sistem akan menampilkan keterangan kesalahan pada data yang diinput. Serta kelebihan lainnya, penyimpanan data secara digital mempermudah proses pengecekan kembali serta membantu menjaga keteraturan administrasi perpajakan di instansi.



Gambar 2. Proses Penginputan Data dan Penyususunan Bukti Potong
Sumber: Data diolah, (2026)

Pemanfaatan Sistem Coretax dalam Administrasi Perpajakan

Pemanfaatan sistem Coretax dalam administrasi perpajakan menjadi salah satu bagian penting dalam mendukung pengelolaan pajak yang lebih terstruktur dan terdokumentasi. Sistem ini digunakan sebagai sarana untuk mengintegrasikan berbagai proses perpajakan, mulai dari pembuatan kode billing, penginputan data, penyusunan bukti potong dalam satu platform digital, dan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Orang Pribadi dan Badan. Dengan adanya sistem administrasi perpajakan digital ini, proses administrasi yang

SENARAI KEARIFAN LOKAL AKUNTANSI:
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Vol. 02, No. 01, Mei 2026, pp. 38-53
e-ISSN: 3110-0023

sebelumnya dilakukan secara manual dapat beralih ke sistem yang lebih tertata, sehingga memudahkan dalam pengelolaan data serta mengurangi potensi kesalahan dalam pencatatan administrasi perpajakan.

Dalam pelaksanaannya, sistem Coretax digunakan dalam berbagai kegiatan sesuai dengan kebutuhan administrasi perpajakan, kegiatan yang dilakukan antara lain membantu proses pembuatan billing melalui menu layanan mandiri kode billing, penginputan data untuk penyusunan bukti potong melalui impor file XML, serta melakukan pengecekan kembali data yang telah diinput dalam sistem. Selain itu, penggunaan fitur impersonate membantu proses administrasi perpajakan dapat dilakukan sesuai kebutuhan pengelolaan data pada instansi. Penggunaan sistem digital tersebut membuat proses administrasi menjadi lebih terarah karena seluruh data tersimpan dalam satu sistem yang terintegrasi.

Dari sisi pemanfaatannya, penggunaan sistem Coretax sebagai sistem administrasi perpajakan digital membantu dalam mengurangi adanya potensi human error dalam proses pengelolaan administrasi perpajakan suatu instansi. Sebelum penerapan sistem perpajakan digital, beberapa proses administrasi perpajakan masih dilakukan dengan sistem administrasi perpajakan semi konvensional dimana beberapa layanan masih terpisah antar aplikasi dan dokumen pendukung masih sering menggunakan Excel atau arsip fisik. Penerapan administrasi perpajakan semi konvensional tersebut sangat berisiko terhadap terjadinya kesalahan pencatatan, ketidaksesuaian data, maupun kesalahan dalam proses penginputan. Melalui sistem Coretax, proses pengecekan dan penelusuran data dapat dilakukan dengan mudah karena seluruh data informasi tersimpan secara digital didalam satu sistem dan dapat diakses kembali ketika diperlukan (Arifin et al., 2025). Selain itu dalam pembuatan bukti potong dengan menggunakan template XML membantu untuk menyesuaikan format data secara lebih sistematis sehingga penginputan data bukti potong menjadi lebih terstruktur dibandingkan dengan penginputan bukti potong yang dilakukan secara terpisah.

Pada proses unggah atau impor file e-bupot, sistem Coretax juga dilengkapi dengan fitur monitoring yang membantu pengguna dalam memeriksa status file yang telah diunggah. Melalui fitur tersebut, pengguna dapat mengetahui apakah proses impor data berhasil atau tidak. Apabila proses unggah berhasil, data akan langsung terbaca dan dapat diproses lebih lanjut dalam sistem. Namun, apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian data, sistem akan menampilkan informasi pada bagian status dengan bacaan validating failed yang disertai dengan deskripsi kesalahan data. Fitur ini membantu proses pengecekan menjadi lebih mudah karena pengguna dapat langsung mengetahui letak kesalahan yang perlu diperbaiki sebelum data diunggah kembali ke dalam sistem. Hal ini mempermudah proses administrasi perpajakan dalam pembuatan bukti potong serta membantu meningkatkan keteraturan administrasi. Namun demikian, penggunaan sistem ini tetap memerlukan ketelitian dalam penginputan data, karena kesalahan dalam memasukkan informasi dapat berdampak pada hasil administrasi yang dihasilkan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap alur sistem serta ketepatan dalam penggunaan fitur menjadi hal yang penting dalam mendukung kelancaran proses administrasi perpajakan. Selain memberikan kemudahan, penggunaan sistem Coretax menunjukkan adanya perubahan yang sangat dominan dari sistem administrasi semi konvensional menuju sistem digital. Perubahan ini

menuntut adanya penyesuaian dari pengguna, baik dalam memahami alur kerja maupun dalam meningkatkan ketelitian saat bekerja. Dalam beberapa kondisi, kendala seperti kesalahan input atau data yang belum sesuai masih dapat terjadi, sehingga diperlukan koordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan proses berjalan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pemanfaatan sistem tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia dalam mengoperasikannya.

Secara keseluruhan, penerapan sistem Coretax memberikan dampak terhadap proses administrasi perpajakan yang menjadi lebih terintegrasi, terdokumentasi, dan mudah ditelusuri kembali ketika diperlukan. Penggunaan sistem digital ini membantu proses kerja berjalan lebih terarah karena berbagai layanan administrasi perpajakan dapat dilakukan dalam satu sistem yang saling terhubung. Selain itu, fitur-fitur yang tersedia dalam Coretax turut mendukung ketelitian dalam pengelolaan data serta membantu mempermudah proses verifikasi administrasi perpajakan di lingkungan BPKPD Kabupaten Pamekasan.

Kendala dan Realita Pengelolaan Administrasi Perpajakan Digital

Selama proses administrasi perpajakan berlangsung, terdapat beberapa kendala dalam proses administrasi perpajakan berbasis sistem administrasi digital. Salah satunya berkaitan dengan data yang diterima, dimana terkadang data tersebut belum lengkap atau masih terdapat perbedaan informasi, sehingga belum bisa langsung diproses. Kondisi seperti ini membuat perlunya dilakukan pengecekan ulang terlebih dahulu, bahkan dalam beberapa kasus harus menunggu perbaikan atau konfirmasi dari pihak terkait sebelum bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya. Selain itu, pada saat proses penginputan data ke dalam sistem, ketelitian menjadi hal yang sangat penting. Kesalahan kecil seperti perbedaan nominal, ketidaksesuaian identitas, kesalahan kode objek pajak, maupun kesalahan format data dapat mempengaruhi hasil administrasi perpajakan yang dihasilkan. Oleh karena itu, proses verifikasi dan pengecekan data biasanya dilakukan lebih dari satu kali untuk memastikan data yang diinput telah sesuai dengan dokumen pendukung yang tersedia.

Dalam pelaksanaanya, proses administrasi perpajakan digital juga memerlukan penyesuaian dalam penggunaan sistem Coretax, terutama pada tahap awal penerapan sistem. Beberapa kendala seperti kesalahan saat impor data, ketidaksesuaian format XML, maupun proses validasi data yang tidak berhasil masih dapat terjadi sehingga memerlukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak terkait agar proses administrasi dapat berjalan dengan baik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan sistem digital tidak sepenuhnya menghilangkan kendala administrasi, tetapi membantu proses identifikasi kesalahan menjadi lebih cepat dan lebih mudah ditelusuri.

Meskipun demikian, penggunaan sistem digital seperti Coretax tetap memberikan kemudahan dalam proses administrasi perpajakan karena proses kerja yang sebelumnya dilakukan secara terpisah kini dapat terintegrasi dalam satu sistem. Selain membantu pengelolaan data menjadi lebih tertata, sistem ini juga mempermudah proses pencarian dokumen dan penelusuran data administrasi perpajakan ketika diperlukan kembali. Dengan demikian, penerapan sistem perpajakan digital tidak hanya membantu meningkatkan efisiensi administrasi, tetapi juga mendukung keteraturan pengelolaan data perpajakan di lingkungan instansi pemerintah daerah.

SENARAI KEARIFAN LOKAL AKUNTANSI:
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Vol. 02, No. 01, Mei 2026, pp. 38-53
e-ISSN: 3110-0023

Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

Hasil dari kegiatan pengabdian yang dilakukan menunjukkan bahwa terdapat peningkatan dalam pengelolaan administrasi perpajakan, khususnya pada tahap pengecekan data, pembuatan billing, serta penginputan data dalam sistem Coretax. Pendampingan yang dilakukan dalam kegiatan ini membantu mendukung kelancaran proses administrasi, terutama dalam memastikan kesesuaian data sebelum diproses lebih lanjut. Hal ini berdampak pada meningkatnya ketelitian dalam pengelolaan data serta membuat alur pekerjaan menjadi lebih tertata dan mudah diikuti.

Perubahan juga terlihat pada proses kerja administrasi perpajakan yang menjadi lebih terarah dan terdokumentasi secara digital. Data administrasi perpajakan yang sebelumnya memerlukan pengecekan berulang secara manual kini dapat ditelusuri kembali melalui sistem sehingga membantu mempercepat proses administrasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem perpajakan digital tidak hanya membantu meningkatkan efisiensi kerja, tetapi juga mendukung ketelitian dalam pengelolaan administrasi perpajakan di instansi. Berdasarkan hasil monitoring selama kegiatan berlangsung, terdapat beberapa perubahan dalam proses administrasi perpajakan setelah penerapan pendampingan dan penggunaan sistem Coretax, terutama pada aspek ketelitian penginputan data, keteraturan proses administrasi, serta efisiensi waktu kerja. Hasil perubahan tersebut dirangkum pada Tabel 2 berikut.

Tabel. 2 Indikator Capaian Hasil Kegiatan Pengabdian

No.	Aspek Kegiatan	Kondisi Sebeum	Kondisi Sesudah	Indikator Capaian
1	Pengecekan Data untuk Administrasi Perpajakan	Data belum selalu lengkap dan masih perlu pengecekan ulang	Pengecekan dilakukan lebih sistematis sebelum proses lanjutan	Meningkatnya ketelitian dan kesesuaian data
2	Pembuatan Kode Billing	Dilakukan sesuai kebutuhan namun belum terstruktur	Proses lebih terarah melalui sistem Coretax	Proses billing lebih tertata dan mudah dicari
3	Penyusunan Bukti Potong	Input data masih berpotensi terjadi kesalahan	Penggunaan template XML membantu kesesuaian format	Berkurangnya kesalahan input data
4	Pengelolaan Administrasi Perpajakan	Sebagian masih manual dan terpisah	Berlangsung dalam satu sistem digital Coretax	Meningkatnya integrasi dan keteraturan administrasi perpajakan
5	Proses Kerja Administrasi	Membutuhkan waktu lebih lama	Lebih cepat dan terstruktur	Meningkatnya efisiensi kerja

Sumber: Data diolah, 2026

Mengacu pada tabel 2, kegiatan pendampingan memberikan perubahan positif terhadap proses administrasi perpajakan di instansi. Perubahan tersebut tidak hanya terlihat pada aspek teknis penggunaan sistem Coretax, tetapi juga pada peningkatan kualitas proses kerja administrasi secara keseluruhan. Pengecekan data yang sebelumnya masih memerlukan pemeriksaan berulang menjadi lebih sistematis, sehingga membantu meminimalkan

SENARAI KEARIFAN LOKAL AKUNTANSI:
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Vol. 02, No. 01, Mei 2026, pp. 38-53
e-ISSN: 3110-0023

ketidaksesuaian data sebelum diproses ke tahap berikutnya. Selain itu, proses pembuatan kode billing dan penyusunan bukti potong menjadi lebih terstruktur dengan adanya sistem digital dan penggunaan template XML. Kondisi ini menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi perpajakan mampu membantu mengurangi potensi kesalahan input data yang sebelumnya sering terjadi akibat proses manual. Penyimpanan data dalam satu sistem juga memberikan kemudahan dalam penelusuran dokumen administrasi, sehingga pekerjaan menjadi lebih tertata dan efisien. Secara keseluruhan, hasil kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa pendampingan penggunaan Coretax memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan administrasi perpajakan. Peningkatan ketelitian, keteraturan proses kerja, serta efisiensi waktu menjadi indikator bahwa pemanfaatan teknologi digital dalam administrasi perpajakan dapat mendukung optimalisasi kinerja administrasi di instansi pemerintah daerah.

Dari sisi administrasi, penggunaan sistem Coretax membantu proses pengelolaan data perpajakan menjadi lebih terintegrasi dibandingkan dengan proses sebelumnya yang masih dilakukan secara terpisah. Penggunaan template XML dalam penyusunan bukti potong membantu menyesuaikan format data secara lebih terstruktur sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan saat proses impor data ke dalam sistem. Selain itu, fitur monitoring dalam sistem Coretax membantu mendeteksi ketidaksesuaian data sehingga proses pengecekan dapat dilakukan lebih mudah sebelum administrasi diproses lebih lanjut.

Dampak terhadap Efektivitas Administrasi Perpajakan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini tidak hanya menghasilkan capaian dalam bentuk proses administrasi yang lebih tertata, tetapi juga memberikan berbagai dampak nyata bagi instansi, baik dalam aspek kerja, efisiensi proses, maupun penguatan sistem kelembagaan. Dari segi sosial, kegiatan ini mendorong adanya perubahan tingkat kinerja menjadi lebih sistematis dan efisien. Pegawai yang terlibat dalam pengelolaan administrasi perpajakan menjadi terbiasa melakukan pengecekan data secara berulang sebelum diproses lebih lanjut, sehingga meningkatkan kesadaran akan pentingnya ketepatan dalam administrasi perpajakan. Selain itu, koordinasi dan komunikasi dalam proses administrasi juga berjalan lebih terarah sesuai dengan tahapan pekerjaan yang berlaku di instansi.

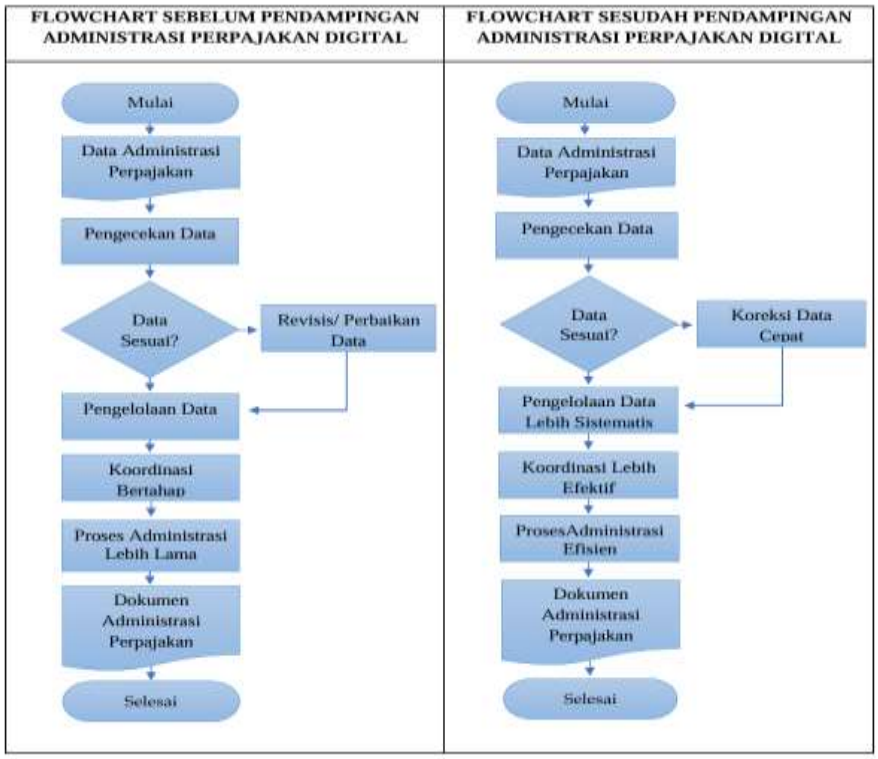
Dari segi ekonomi, penggunaan sistem Coretax dalam administrasi perpajakan membantu proses kerja menjadi lebih efisien. Pekerjaan yang sebelumnya dilakukan secara manual dan memerlukan waktu lebih lama kini dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan lebih terstruktur melalui sistem digital. Perubahan tersebut juga dirasakan oleh pegawai yang terlibat dalam pengelolaan administrasi perpajakan di BPKPD Kabupaten Pamekasan. Berdasarkan hasil komunikasi selama kegiatan berlangsung, salah satu pegawai menyampaikan bahwa "Sebelumnya proses administrasi perpajakan membutuhkan waktu lebih lama karena data harus dicek berulang dan beberapa tahapan masih dilakukan secara terpisah, karena sebelumnya beberapa tahaan administrasi masih dilakukan melalui DJP Online, e-Bupot, dan e-Billing. Setelah menggunakan Coretax, proses kerja menjadi lebih ringkas karena data dapat langsung ditelusuri dalam sistem. Selain lebih cepat, penggunaan sistem digital juga membantu mengurangi penggunaan kertas dan pencetakan dokumen, sehingga proses administrasi menjadi lebih efisien dari segi waktu dan anggaran." Kondisi

SENARAI KEARIFAN LOKAL AKUNTANSI:
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Vol. 02, No. 01, Mei 2026, pp. 38-53
e-ISSN: 3110-0023

tersebut menunjukkan bahwa penerapan sistem administrasi perpajakan digital melalui Coretax tidak hanya membantu mempercepat proses kerja, tetapi juga mendukung efektivitas dan efisiensi pengelolaan administrasi perpajakan di instansi.

Dari segi lingkungan, penerapan sistem digital melalui Coretax berkontribusi dalam mengurangi penggunaan kertas dalam proses administrasi perpajakan. Pengelolaan data yang dilakukan secara digital, seperti penggunaan format file XML dan penyimpanan data dalam sistem, membantu meminimalkan pencetakan dokumen secara fisik. Hal ini membuat pekerjaan menjadi lebih praktis sekaligus mengurangi penggunaan kertas. Terakhir yakni dari segi kelembagaan, kegiatan ini membantu membuat pengelolaan administrasi perpajakan di instansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pamekasan menjadi lebih rapi dan teratur. Proses kerja yang dilakukan secara bertahap, mulai dari pengecekan data, pembuatan billing, hingga penyusunan bukti potong, membuat alur pekerjaan menjadi lebih jelas dan mudah diikuti. Selain itu, penggunaan sistem Coretax juga membantu penyimpanan data secara digital sehingga memudahkan proses pencarian berkas maupun dokumen apabila dibutuhkan, serta mendukung pengelolaan administrasi yang lebih tertata.

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian yang telah dilakukan, terdapat perbedaan pada proses administrasi perpajakan sebelum dan sesudah pendampingan administrasi perpajakan digital berbasis Coretax. Perubahan tersebut terlihat pada alur kerja administrasi yang menjadi lebih terstruktur, terintegrasi, dan lebih efisien dibandingkan proses sebelumnya yang masih dilakukan secara terpisah dan bertahap. Perbandingan proses administrasi perpajakan sebelum dan sesudah pendampingan dapat dilihat pada diagram alur (*flowchart*) berikut.



Gambar 3. Flowchart Perbandingan Proses Administrasi Perpajakan Sebelum dan Sesudah

SENARAI KEARIFAN LOKAL AKUNTANSI:
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Vol. 02, No. 01, Mei 2026, pp. 38-53
e-ISSN: 3110-0023

Pendampingan Administrasi Perpajakan Digital

Berdasarkan flowchart tersebut, dapat diartikan bahwa pendampingan administrasi perpajakan digital berbasis Coretax memberikan perubahan pada alur kerja administrasi perpajakan menjadi lebih terarah dan efisien. Proses administrasi yang sebelumnya memerlukan tahapan kerja yang lebih panjang dan dilakukan secara terpisah, setelah adanya pendampingan menjadi lebih sistematis melalui pengelolaan data yang terintegrasi dalam satu sistem digital. Selain itu, proses pengecekan dan perbaikan data juga dapat dilakukan dengan lebih cepat sehingga mendukung kelancaran administrasi perpajakan di instansi.

SIMPULAN

Kegiatan pendampingan administrasi perpajakan berbasis sistem digital yang dilakukan selama masa pengabdian menunjukkan bahwa proses kerja yang sebelumnya masih bertahap dan bergantung pada pengecekan berulang mulai berubah menjadi lebih tertata dan jelas. Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan seperti pengecekan kesesuaian data, pembuatan kode billing, serta penyusunan bukti potong melalui sistem Coretax memberikan gambaran nyata bagaimana administrasi perpajakan dijalankan secara sistematis. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan kegiatan, yaitu mendukung pengelolaan administrasi perpajakan agar lebih efektif dan terstruktur dapat tercapai.

Dari sisi manfaat, kegiatan ini membantu meningkatkan ketelitian dalam pengelolaan data serta memudahkan proses administrasi yang berlangsung. Penggunaan sistem digital tidak hanya mempermudah pekerjaan, tetapi juga membuat data lebih rapi dan mudah ditelusuri kembali ketika diperlukan. Selain itu, proses kerja yang sebelumnya memerlukan waktu lebih lama menjadi lebih efisien karena didukung oleh sistem yang lebih memadai. Selama pelaksanaan kegiatan, terdapat beberapa hal yang menjadi pembelajaran, terutama terkait pentingnya kesiapan data dan ketelitian dalam proses penginputan. Masih ditemukannya data yang belum lengkap atau adanya perbedaan informasi menunjukkan bahwa proses administrasi tidak hanya bergantung pada sistem, tetapi juga pada ketepatan data yang digunakan. Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan pengecekan ulang serta komunikasi dengan pihak terkait agar proses dapat berjalan dengan lancar.

Keberlanjutan kegiatan ini dapat dilakukan melalui pemanfaatan sistem digital yang lebih optimal serta adanya pendampingan lanjutan dalam penggunaan sistem administrasi perpajakan. Peran aktif dari pihak instansi juga diperlukan dalam menjaga keteraturan proses kerja serta memastikan bahwa sistem yang telah digunakan dapat dimanfaatkan secara konsisten. Sejalan dengan hal ini, pengabdian selanjutnya dapat direkomendasikan pada kegiatan pendampingan yang lebih mendalam, seperti pelatihan penggunaan sistem perpajakan digital yang disertai penyusunan panduan kerja sederhana yang dapat digunakan sebagai acuan dalam proses administrasi. Dengan demikian, rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian berikutnya agar lebih optimal dan memberikan dampak yang lebih luas.

ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trunodjoyo Madura yang telah memberikan kesempatan

untuk melaksanakan kegiatan magang dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) sebagai bagian dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, serta bimbingan selama proses pelaksanaan kegiatan hingga penyusunan artikel ini. Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pamekasan yang telah memberikan kesempatan serta membimbing selama kegiatan berlangsung. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada para pegawai atau staf yang terlibat dalam pengelolaan administrasi perpajakan yang telah banyak membantu dalam memberikan arahan, penjelasan, serta pendampingan selama proses kegiatan berlangsung. Melalui bimbingan tersebut, penulis dapat memahami secara langsung alur administrasi perpajakan yang diterapkan di lingkungan kerja. Semoga kegiatan pengabdian ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

REFERENSI

Arifianti, N., Agustina, H., & Latifah, Z. Z. (2025). Tax Obligation Education and the Utilization of Tax Information Systems to Develop a Tax-Conscious Generation Edukasi Kewajiban Perpajakan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Perpajakan untuk Meningkatkan Generasi Sadar Pajak. *Indonesia Berdaya*, *7*(1), 173–180.

Arifin, M. A., Putra, P. S., Putra, A. E., & Saladin, H. (2025). Edukasi Penggunaan Coretax Administration System. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Ekonomi Dan Bisnis Digital (JPMEBD)Aziz*, *2*(2), 163–170.

Aulia, D., Rahman, F., & Yulianto, H. (2025). Digitalisasi Administrasi Perpajakan Menggunakan Coretax oleh Mahasiswa KKLP STIE YPUP Makassar di Kantor Konsultan Pajak. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, *3*(9), 4662–4668.

Azizah, K., Laila, M., Khoirunisak, N., & Hidayatullah, R. (2025). Pembuatan ecobrick metode pengabdian service learning. *Jurnal An Najah (Jurnal Pendidikan Islam Dan Sosial Keagamaan)*, *04*(03), 1–4.

Baihaqi, A., & Kristina, L. (2026). Refleksi Efektivitas Penerapan Coretax dalam Sistem Perpajakan Indonesia. *Jurnal Publikasi Sistem Informasi Dan Manajemen Bisnis*, *5*.

David, & Tjaraka, H. (2026). Persepsi Akuntan Pajak terhadap Transisi Digitalisasi Perpajakan : Studi Fenomenologi pada Implementasi Coretax. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, *10*, 381–393. https://doi.org/https://doi.org/10.33395/owner.v10i1.2901

Dewi, W. S., Yani, A., & Aminah, S. (2025). Pendampingan Aktivasi Coretax untuk Meningkatkan Kepatuhan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kediri. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Akuntansi, Manajemen, Dan Ekonomi*, *2*, 18–24.

Direktorat Jenderal Pajak, D. (2025). *Kebijakan Perpajakan Sehubungan Dengan Masa Transisi Implementasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan Dalam Rangka Penyampaian Spt Masa Pph Pasal 21 Masa Pajak Desember 2025*. *021*, 5736088.

Dwiki.S, F., P, B. R., & P, R. B. (2026). Peran Manajemen Strategis dalam Implementasi Coretax terhadap Keberhasilan Reformasi Administrasi Perpajakan. *Pajak Dan Manajemen Keuangan*.

Hamim, M., Ridiansyah, R., & Hady, A. F. (2026). Kontribusi Mahasiswa Magang MBKM dalam Peningkatan Kinerja BPPD Sidoarjo. *Senarai Kearifan Lokal Akuntansi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *01*(02), 38–50.

Hertina, D., Hendayana, Y., Ichsani, S., Fatihat, G. G., & Pratiwi, L. N. (2025). DIGITAL

PENGELOLAAN Transformasi digital perpajakan melalui implementasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax) oleh Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 2025 membawa perubahan dan implementasi , sehingga hasil kegiatan tidak berhenti pada penin. *Jubaedah: Jurnal Pengabdian Dan Edukasi Sekolah*, *5 No. 3*(10.46306/jub.v5i3), 1427–1433. https://doi.org/10.46306/jub.v5i3.518

Isnan, N., & Sofa, D. M. (2026). Transformasi Digitalisasi Perpajakan : Transisi Dari Djp Online Ke Coretax Pada Inspektorat Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Indonesia STIE Widya Wiwaha*, *6*(1), 1–15. https://doi.org/10.32477/jrabi.v6i1.1264

Jenderal Pajak, D. (2025). *Keterangan Tertulis terkait Implementasi Coretax DJP*.

Laili, N. I., Saputra, M. D., & Sarmini. (2025). Transformasi Digital Dalam Perpajakan : Pelatihan Coretax Untuk Meningkatkan Kepatuhan Pajak Digital Transformation in the Tax Sector : CoreTax Training. *Jurnal PUAN Indonesia*, *7*(1), 541–548.

Lestari, A. I., & Fadrianti, R. (2026). Pendampingan Administrasi Perpajakan dan Literasi Layanan Digital DJP melalui Program KKN-Profesi di KPP Pratama Makassar Selatan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *2*((2)), 48–50.

Qosim, & Winarsih, T. (2025). Literasi Pajak Digital bagi UMKM : Strategi Pemberdayaan Masyarakat melalui E-Sistem Perpajakan. *BERBAKTI Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *02*(02), 71–79.

Rochim, A. I., & Amiranto, J. B. (2026). Pendampingan Kegiatan Mahasiswa Magang Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur Dalam Kinerja Administrati Penerapan Arsip Digital. *Sejahtera: Jurnal Inspirasi Mengabdi Untuk Negeri*, *06*(01), 106–122.

Suliah, S., & Utomo, R. B. (2023). *Pendampingan Wajib Pajak Dalam Pelaporan Pajak Restoran Pada Aplikasi E-SPTPD Di Kabupaten Kulon Progo Taxpayer Assistance In Restaurant Tax Reporting On The E-SPTPD Application In Kulon Progo Regency*. *2*(2), 97–104.

Wijaya, A. N. P., Amalia, C., & Caniago, V. A. (2025). Implementasi Sistem Informasi Pajak Daerah (SIPD) dan Dampaknya Terhadap Efisiensi Administrasi. *Judge : Jurnal Hukum*, *06*(02), 267–276.